

## DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERIODE 2024

**Akilah Nur**

*akila01nur@gmail.com*

Universitas Bina Sarana Informatika

**Anggun Sri Utami**

*anggunsriutm9@gmail.com*

Universitas Bina Sarana Informatika

**Farrel Maisya Ramadhan**

*farrelmaisya3110@gmail.com*

Universitas Bina Sarana Informatika

**Theresia Priselis A. L. Koban**

*theresiapriselis@gmail.com*

Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Jakarta 10450, Indonesia

Korespondensi penulis : *akila01nur@gmail.com*

***Abstract** Community involvement is a critical factor in achieving transparent and accountable village financial management. This study aims to assess the impact of community participation on the accountability of village financial management in Menganti District, Gresik Regency. The research utilized a questionnaire survey method. The findings reveal that most respondents were satisfied with their involvement in village financial decision-making. This involvement positively influences community perceptions of the village government's performance. The study highlights that community participation enhances public trust in village governance and fosters more transparent and accountable financial management.*

***Keywords:** Community Participation, Accountability, Transparency*

**Abstrak** Keterlibatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah survei kuisioner. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden puas dengan tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan keuangan desa. Keterlibatan ini memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Studi ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa serta mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

*Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi*

### **Pendahuluan**

Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menjadi elemen penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan prioritas layanan, serta mengembangkan program yang responsif.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat tidak hanya mendorong transparansi tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, di mana keterbukaan informasi dan

akuntabilitas menjadi landasan utama. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, partisipasi aktif juga membantu pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Sebagai bentuk pengakuan terhadap desa, pemerintah mengatur fungsi dan kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan hak kepada desa untuk mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri demi mewujudkan tujuan kemerdekaan seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan yang baik, yang terus diupayakan di Indonesia.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Karena keterbatasan kapasitas dan keahlian aparatur desa, diperlukan penyederhanaan proses pengelolaan tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci dalam mendukung akuntabilitas tersebut.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Desa Menganti, Kabupaten Gresik. Sumber hukum yang digunakan mencakup undang-undang, pendapat ahli, buku, jurnal, serta hasil penelitian hukum lainnya.

Metode survei digunakan untuk mengetahui dampak partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sampel diambil dari populasi untuk menganalisis hubungan antarvariabel. Penelitian ini melibatkan 76 responden yang mayoritas adalah perempuan berusia 21–50 tahun. Kuesioner terdiri dari dua pilihan jawaban, yaitu setuju dan tidak setuju, dengan fokus pada tujuh indikator partisipasi masyarakat.

Penelitian survei dilakukan terhadap populasi besar atau kecil, namun data yang diteliti adalah data dari sampel yang diambil dari populasi sehingga ditemukan kejadian relatif, sebaran, dan hubungan antar variabel. Dengan kata lain dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah di Desa Kecamatan Menganti Provinsi Gresik.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dan disebarakan melalui sosial media kepada masyarakat di Desa Menganti Kabupaten Gresik. Dalam metode ini, responden atau subjek penelitian bertanggung jawab memilih dan menjawab pertanyaan dan pernyataan. Peneliti memilih metode ini karena percaya bahwa metode survei, yaitu mengumpulkan data primer langsung dari sumber aslinya melalui kuesioner, lebih efektif dan efisien untuk jumlah subjek yang banyak. Kategori jawaban dalam kuesioner meliputi 2 pilihan yaitu setuju dan tidak setuju. Dalam kuesioner ini mengaitkan 7 indikator pembahasan yang diolah menjadi beberapa pertanyaan. Responden survei ini adalah Masyarakat di desa Kecamatan Menganti

Provinsi Gresik yang berjumlah 76 responden. Mayoritas responden di desa Kecamatan Menganti Provinsi Gresik adalah perempuan.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi terhadap jawaban responden mengenai variabel partisipasi Masyarakat dalam menanggapi pengelolaan keuangan di kecamatan meganti provinsi Gresik, di perkirakan sekitar 80% masyarakat berusia 21-50 tahun menyatakan puas dengan pengelolaan keuangan pemerintah, cara kerja pemerintah yang telah melibatkan Masyarakat dan Masyarakat merasa pemerintah daerah sangat terbuka dalam mengelola anggaran atau mengambil Keputusan. Sisanya yaitu 20% Masyarakat menyatakan tidak puas karena mereka merasa masih ada pelayanan publik yang kurang baik dan infrastruktur seringkali tidak optimal. Dari 20% masyarakat yang menyatakan tidak puas rata – rata berusia 18-20 tahun. Dan mereka merasa pelayanan kesehatan di desa Menganti kurang memadai.

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai proses yang mencerminkan praktik tata kelola yang baik dan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya di tingkat desa :

- 1. Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan,** adalah mekanisme yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk memastikan pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

#### **Perencanaan**

- a. Identifikasi Kebutuhan:**  
Masyarakat, bersama pemerintah atau pihak pengelola keuangan, mengidentifikasi masalah utama yang perlu diatasi, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.
- b. Musyawarah:**  
Forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diadakan untuk mengumpulkan masukan masyarakat mengenai program atau proyek yang perlu dilakukan.
- c. Penyusunan Rencana:**  
Usulan yang telah disepakati dirumuskan menjadi rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan skala prioritas, sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan masyarakat.

#### **Pengambilan Keputusan**

- a. Penyusunan Anggaran:**  
Rencana kerja dan anggaran yang disusun diajukan untuk pembahasan dan persetujuan dalam forum pengambilan keputusan, seperti dewan perwakilan rakyat atau lembaga setempat.
- b. Transparansi**  
Proses ini dilakukan secara terbuka dengan penyampaian informasi yang jelas mengenai pendapatan, alokasi, dan prioritas belanja.

c. Pengesahan

Setelah melalui diskusi dan persetujuan, rencana anggaran dan kebijakan keuangan disahkan untuk pelaksanaan.

**2. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kepemimpinan merupakan suatu proses pengaruh langsung, dimana pemimpin merupakan figur otoritas yang memotivasi bawahan untuk mengambil tindakan, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan. Kepemimpinan dianggap sebagai suatu bentuk kendali terpusat di mana seseorang menjalankan kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. Pemimpin desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui program, kegiatan, dan penetapan prioritas untuk mencapai perekonomian desa yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Terwujudnya perekonomian dan masyarakat desa yang maju serta pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Tidak hanya kepala desa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pelaksana pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala desa atau dengan kata lain staf desa. Bertanggung jawab atas urusan umum dan akuntansi. Setiap organisasi desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan tidak hanya mengandalkan satu tangan saja. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan oleh tim dan bukan oleh satu sumber untuk menghindari penipuan.

**3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa:**

Semakin besar partisipasi masyarakat maka semakin besar pula tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan sumber daya desa. Melalui partisipasi masyarakat, alternatif dan usulan dapat disampaikan kepada pemerintah. Usulan prioritas penggunaan dana desa diperoleh, dibahas dan ditentukan oleh masyarakat desa. Dari sudut pandang prinsip. Prinsip pengelolaan keuangan desa adalah partisipatif, bertanggung jawab, tertib dan disiplin. Anggaran ini memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan menjadi lebih tepat sasaran dan lebih baik, sehingga masyarakat yang aktif menjadi lebih berkomitmen terhadap program dan tujuan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tujuan program, dan tujuan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tujuan yang mendasar. Untuk kemajuan permainan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap tanggung jawab keuangan desa..

**4. Pengawasan dari Pihak Internal**

Hal ini merupakan proses pemantauan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di lingkungan organisasi pemerintah desa untuk memastikan dana

desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini penting untuk meminimalisir kecurangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Berikut uraian mengenai pengawasan internal dana desa:

- a. Kepala desa bertanggung jawab langsung dalam mengelola sumber daya desa dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes. Pemimpin desa juga harus memantau pelaksanaan program untuk memastikan tujuan tercapai.
- b. Badan Pertimbangan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga yang memantau kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan sumber daya desa. Memantau konsistensi antara APBD, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan realisasi anggaran. Memberikan pendapat dan kritik untuk perbaikan pengelolaan dana desa.
- c. Tim pelaksana yang terdiri dari perangkat desa lainnya seperti sekretaris dan bendahara desa membantu memastikan pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan, dilakukan dengan baik. Kepala desa bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dana desa dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dan APBDes. Kepala desa juga harus memantau pelaksanaan program untuk memastikan tujuan dan sasaran tercapai.

#### **5. Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan, efisien dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa pada berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dampak positifnya antara lain peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas pemerintah desa, terjaminnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, minimalisasi penyimpangan dan korupsi, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pemerintah desa, dan peningkatan kesadaran pemerintah desa. partisipasi publik. Dampak positif partisipasi:

- a. Meningkatkan transparansi.
- b. Memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.
- c. Memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Mengurangi potensi penyimpangan dan korupsi.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- f. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan desa di kalangan masyarakat.
- g. Mendorong inovasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah desa.

## 6. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa penuh dengan tantangan dan hambatan yang dapat berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan yang sering ditemui. Akuntabilitas atau tanggung jawab merupakan bentuk komitmen pribadi untuk melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa merupakan suatu proses pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk menjamin kebenaran pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena kegiatan pemerintah ditujukan untuk memenuhi misi rakyat, maka masyarakat tidak hanya berhak menerima informasi pengelolaan keuangan desa, namun juga berhak menuntut pertanggungjawaban pelaksanaan dan penegakan pengelolaan keuangan desa.

## 7. Langkah Identifikasi Kesenjangan Kompetensi SDM Desa

### Penilaian Awal (Skill Assessment):

- a. Lakukan survei, wawancara, atau tes sederhana untuk memahami kemampuan perangkat desa terkait pengelolaan keuangan.
- b. Amati pelaksanaan tugas harian untuk mengukur efisiensi kerja.

*Hasil:* Pemetaan kompetensi perangkat desa dan identifikasi kebutuhan pelatihan spesifik.

### Analisis Beban Kerja:

- a. Bandingkan tugas harian dengan kemampuan yang dimiliki.
- b. Diskusikan kendala dalam pekerjaan untuk menentukan prioritas pengembangan.

*Hasil:* Gambaran kesenjangan antara kebutuhan tugas dan kapasitas perangkat desa.

### Review Pelatihan dan Kinerja:

- a. Tinjau riwayat pelatihan untuk mengevaluasi dampaknya.
- b. Analisis laporan kinerja untuk menentukan siapa yang memerlukan peningkatan.

*Hasil:* Identifikasi pelatihan yang efektif dan perangkat desa yang butuh pengembangan.

## **8. Metode Hemat untuk Meningkatkan Kompetensi**

### **Peer Learning:**

- a. Perangkat desa yang lebih kompeten menjadi mentor bagi rekan lainnya.
- b. Fokus pada simulasi kerja dan berbagi pengalaman.

### **Pelatihan Gratis Pemerintah:**

Manfaatkan program pengembangan SDM dari Dinas terkait tanpa biaya tambahan.

### **Pelatihan Online:**

Gunakan platform gratis seperti YouTube atau Coursera untuk pelatihan teknis sederhana.

### **Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi/LSM:**

Gandeng institusi atau LSM dalam program pelatihan, misalnya manajemen keuangan atau teknologi.

### **Modul Mandiri:**

Buat panduan pelatihan sederhana yang bisa dipelajari secara mandiri oleh perangkat desa.

Dengan langkah ini, desa dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara tepat dan meningkatkan kapasitas perangkatnya tanpa membebani anggaran.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penjelasan di atas terkait hasil dan pembahasannya yaitu bahwa sebagian masyarakat kabupaten gresik menyatakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah sangat baik. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gresik. Artikel tersebut menyoroti bahwa sekitar 80% masyarakat puas dengan pengelolaan keuangan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, sementara 20% masih belum puas dengan beberapa layanan publik seperti layanan kesehatan. Penguraian proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Jurnal ini membahas peran kepemimpinan kepala desa dan mekanisme pengawasan eksternal untuk memastikan pengelolaan dana desa yang tepat. Dokumen ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang lebih besar dapat secara signifikan berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana

desa.

## Referensi

Referensi utama adalah jurnal internasional dan jurnal nasional. Semua referensi harus yang paling relevan dan merupakan sumber terbaru. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini:

- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183-198.
- Ahmad, S., & Sapar, S. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, sistem keuangan desa dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten luwu timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 3(2), 81-93.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Roby, G. A., Affrian, R., & Berkatillah, A. (2024). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PADA DESA AMPUKUNG KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(1), 96-100.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 51-65.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Khasanah, Risda Nur. 2020. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Universitas Pancasakti Tegal*. Vol. 14. (19). hal. 90-100.
- Pahlawan, Enggar Wahyuning., Wijayanti, Anita., Suhendro. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*. Vol. 2. (2). Hal. 162-172.